

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Selvi¹, Muhammad Irwan Padli Nasution²
1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Email:selvii003i@gmail.com,irwannst@uinsu.id

Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan negara merupakan elemen penting dalam meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan efektivitas pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat tidak hanya di perkotaan namun juga di pedesaan. Baik sektor publik maupun swasta perlu melakukan transisi dari layanan manual ke layanan elektronik, dan lembaga pemerintah yang sebelumnya menggunakan layanan berbasis kertas kini beralih ke layanan elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ICT digunakan untuk mendukung e-Government.

Kata kunci: e-Government, , manfaat TIK, Strategi TIK

Abstract

The use of information technology in state administration is an important element in increasing efficiency, openness and effectiveness of public services. Information and communication technology has become a basic need for society, not only in urban areas but also in rural areas. Both the public and private sectors need to transition from manual services to electronic services, and government agencies that previously used paper-based services are now switching to electronic services. The aim of this research is to determine the extent to which ICT is used to support e-Government.

Keyword: e-Government, , benefits of ICT, ICT Strategy

I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional pemerintahan telah menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam transformasi tata kelola dalam beberapa dekade terakhir. Ketika kebutuhan masyarakat menjadi lebih kompleks, pemerintah di seluruh dunia terus mencari cara untuk meningkatkan cara mereka melayani warganya. Di sektor pemerintahan, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi telah mendorong pejabat pemerintah untuk meramalkan pola-pola baru untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan meningkatkan pelayanan untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintahan yang baik. Upaya mendukung pengembangan e-Government secara jelas tertuang dalam Pasal 1 Bab 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendefinisikan sistem e-Government sebagai: menyatakan bahwa hal itu akan dihilangkan. SPBE merupakan penyelenggara pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Peraturan negara mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan negara dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang sederhana dan cepat

II. METODE PENELITIAN

Dalam artikel jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi. Dengan teknik mengumpulkan beberapa artikel dan jurnal sebagai panduan penulisan atau penyiapan artikel jurnal ini. Penulis melakukan observasi dari artikel dan jurnal untuk mendapatkan data-data mengenai penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan

III. HASIL/PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik dengan berbagai cara, seperti mempercepat proses, mengurangi birokrasi, dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan. Ada beberapa penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi layanan publik yaitu :

- a. Pendaftaran dan pengurusan online
- b. Sistem informasi manajemen
- c. Akses yang mudah
- d. Pengembangan aplikasi mobile

Penerapan teknologi informasi telah membuka akses informasi publik yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan keterbukaan kepada publik. Beberapa inisiatif yang mendukung hal ini antara lain pengembangan e-Government, penyediaan layanan publik online, dan penyajian informasi dan data secara digital. penerapan teknologi informasi juga memungkinkan terjadinya transparansi informasi yang merupakan salah satu syarat konsep kemitraan tata kelola terbuka.

B. Strategi Implementasi Teknologi Informasi

Strategi yang digunakan pemerintah dalam mengimplementasikan teknologi informasi, seperti pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, pengembangan dan koordinasi pelayanan informasi penunjang terwujudnya masyarakat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi.

Dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan,

ada beberapa pendekatan yang dapat diperkenalkan, khususnya dalam konteks pendidikan dan pemerintahan. Ada tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam proses implementasi.

Peluang , Implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan dan pendidikan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memudahkan akses ke informasi dan layanan.

Tantangan, tantangannya itu seperti keterampilan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi. masalah yang dihadapi meliputi kurangnya pemantauan dan evaluasi, sertakesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital.

C. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Keterbukaan Pemerintah

Pengaruh yang signifikan terhadap keterbukaan pemerintah, Implementasi TIK dalam pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah. Dampak positif dari TIK dalam bidang pemerintahan yaitu : pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan

masyarakat umum, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, dan hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi penghalang bagi masyarakat.

Kesimpulan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terbukti menjadi kunci penting dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat.

Berbagai strategi penerapan teknologi informasi yang diterapkan pemerintah, seperti registrasi dan pengolahan online, sistem informasi manajemen, kemudahan akses,

dan pengembangan aplikasi mobile, berkontribusi positif terhadap transformasi pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga membuka akses informasi publik, meningkatkan transparansi, dan mendukung konsep kemitraan tata kelola yang terbuka.

Inisiatif seperti e-Government, layanan publik online, dan representasi digital atas informasi dan data merupakan langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi penerapan teknologi informasi meliputi pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras, koordinasi layanan informasi, dan keterlibatan aktif dengan komunitas bisnis.

Meskipun ada peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan akses terhadap informasi, tantangan seperti keterampilan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi, pemantauan perangkat digital, penilaian, dan masalah operasional harus ditanggapi dengan serius.

Dampak teknologi informasi terhadap keterbukaan pemerintah merupakan poin penting.

Penerapan TIK dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga pemerintah. Dampak positif yang dirasakan masyarakat antara lain peningkatan pelayanan, peningkatan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum, serta peningkatan kekuasaan melalui informasi yang mudah diakses.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi informasi merupakan katalis untuk mengatasi hambatan birokrasi dan mencapai pemerintahan yang lebih terbuka dan efisien.

Daftar Pustaka

Indrayani etin - Gatningsih,(2013), *Sistem informasi manajemen pemerintahan*, IPDN PRESS, Jalan raya bandung - Sumedang KM 20 Jatinangor.

Kompas.com, Tantangan dan peluang efektivitas pembelajaran daring, Tantangan dan peluang efektivitas pembelajaran daring, <https://www.compasiana.com/mohamadfauzannaufal5068/6288ea471583473ea3404d463/tantangan-dan-peluang-efektifitas-pembelajaran-daring>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023

Safrida 1, Nila Safrida2, Muhammad3 (2021), *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, Aceh.

Sistem Informasi, Dampak positif dan Negatif IT di bidang pemerintahan (E-Government), <https://si.ittelkom-pwt.ac.id/2018/03/30/dampak-positif-dan-negatif-it-di-bidang-pemerintahan-e-government> , Diakses pada tanggal 10 desember 2023.